

PENGARUH EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KESERASIAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jambi)

Marnas¹⁾, Afrizal²⁾, Yuliusman³⁾

¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi*

^{2&3)}*Dosen Pembimbing*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of effectiveness, efficiency and harmony, the regional financial independence either partially or simultaneously (Actual case study on district budget / Environment City in Jambi Province) 2008 -2012.

Data used in this study is secondary data. Data in the form of financial ratios in assessing performance accountability district budget and municipal in Jambi Province on the district budget realization report and municipal in Jambi Province in 2008 and 2012. Research is explanatory research is clear that analysis financial ratios in the budget in the form of effectiveness, efficiency, harmony, growth, and the proportion of income and expenditure in the district budget and municipal in Jambi Province has an influence on independence. The district budget and municipal in Jambi Province in demonstrating the ability of local governments to finance their own activities of government, development, and service to the community. The instruments used in this study statistics with multiple linear regression analysis to determine the level of the relationship and knowledge of public accounting as a tool The main analysis.

Statistical Analysis Based on the analysis it is known that the area ratio effectiveness significant negative effect on self-sufficiency ratio. Therefore, when the effectiveness of PAD to the target area increases, this effect of reducing the independence of the district budget as Jambi City, the number PAD District Municipality is a very small amount and is unable to independently meet the needs of a budgeting cost, regional financial efficiency ratios significant positive effect on the independence of the public service. So if the financial efficiency of the region tends to be better, it is an against budget independence. Because the average - average development cost is top shopping district budget as Jambi City, more than the total earnings (deficit), Harmony ratio of public expenditure to the independence of development or PAD District or City to significant negative effect on public services. So if your chance in shopping activities tend to be better, it does not affect the independence of local revenues. Due average - above average shopping district budget financing municipal in Jambi province cannot afford financed by a small PAD. Simultaneously, it can be concluded that the variable effectiveness, efficiency and harmony by together - equally significant effect on Financial independence Jambi City District. So if effectiveness, efficiency and harmony together increases, the independence of the Financial District City in the province of Jambi. Would be also increase.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Harmony, and Regional Financial Independence.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas, efisiensi dan keharmonisan, kemandirian keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan (Studi kasus aktual tentang anggaran kabupaten / Kota Lingkungan di Provinsi Jambi) 2008 -2012.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam bentuk rasio keuangan dalam menilai akuntabilitas kinerja anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Jambi pada laporan realisasi anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Jambi pada tahun 2008 dan 2012. Penelitian adalah penelitian penjelasan. Jelas bahwa analisis rasio keuangan dalam anggaran dalam bentuk efektivitas, efisiensi, harmoni, pertumbuhan, dan proporsi pendapatan dan pengeluaran dalam anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Jambi memiliki pengaruh terhadap independensi. Anggaran kabupaten dan kotamadya di Provinsi Jambi dalam menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah mereka sendiri, pengembangan, dan layanan kepada masyarakat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini statistik dengan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui tingkat hubungan dan pengetahuan akuntansi publik sebagai alat analisis utama.

Analisis Statistik Berdasarkan analisis diketahui bahwa efektivitas rasio wilayah berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio kemandirian. Oleh karena itu, ketika efektivitas PAD ke daerah target meningkat, efek mengurangi independensi anggaran kabupaten ini sebagai Kota Jambi, jumlah PAD Kabupaten Kota adalah

jumlah yang sangat kecil dan tidak dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan biaya penganggaran, rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap independensi pelayanan publik. Jadi, jika efisiensi keuangan daerah cenderung lebih baik, itu bertentangan dengan independensi anggaran. Karena rata-rata biaya pembangunan adalah anggaran belanja daerah teratas sebagai Kota Jambi, lebih dari total pendapatan (defisit), rasio Harmony pengeluaran publik terhadap kemandirian pembangunan atau PAD Kabupaten atau Kota berpengaruh negatif signifikan pada layanan publik. Jadi jika peluang Anda dalam kegiatan belanja cenderung lebih baik, itu tidak mempengaruhi kemandirian pendapatan daerah. Karena rata-rata - di atas rata-rata anggaran belanja kabupaten belanja di provinsi Jambi tidak mampu dibiayai oleh PAD kecil. Secara bersamaan, dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas, efisiensi dan harmoni secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian Keuangan Kabupaten Kota Jambi. Jadi jika efektivitas, efisiensi dan kerukunan bersama meningkat, kemandirian Financial District City di provinsi Jambi. Juga akan meningkat.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Harmoni, dan Kemandirian Keuangan Daerah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Kewajiban itu dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal. Dalam era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas mengakibatkan semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintahan yang baik ditandai dengan empat pilar utama yang merupakan elemen dasar utama yang paling terkait satu dengan yang lain

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari isi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target Pendapatan Daerah dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.

Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya. Beberapa rasio yang digunakan dalam analisis keuangan terhadap APBD antara lain : rasio kemandirian (otonomi fiskal) untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, rasio efisiensi dan efektivitas untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, rasio keserasian untuk mengukur seberapa besar pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, rasio pertumbuhan dan proporsi untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah (Halim,2007).

Komposisi Pendapatan Daerah pada APBD TA 2012 secara akumulatif kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. besaran jumlah uang dan persentase dari ketiga sumber Pendapatan Daerah. Terlihat bahwa dana perimbangan masih mendominasi sumber Pendapatan Daerah yaitu sebesar sebesar 66,3% atau Rp432,697 triliun, sedangkan PAD hanya sebesar 21,5% atau sebesar Rp140,302 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 12,2% atau sebesar Rp79,866 triliun. Dari TA 2008 hingga TA 2012, Pendapatan dan Belanja mengalami pertumbuhan . Pendapatan tumbuh sebesar 19,98 %. Pada TA 2011 nilai Pendapatan Tahun 2011 sebesar Rp. 9.351,92 milyar lebih besardari tahun 2010 sebesar Rp.. 7.794,32 Belanja mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 27, 37 %. Pada TA 2008 nilai Belanja sebesar Rp36.664, 14 milyar naik menjadi Rp. 10.073,14 milyar Trend defisit yang dianggarkan daerah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2008 hingga 2012 cenderung terus mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2012 defisit anggaran meningkat sebesar 13,9%.(Sumber : Dirjen Keuangan Dan Perimbangan Tahun 2013).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapattan dan belanja daerah dari tahun 2008 hingga tahun 2012 telah PAD terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 PAD seluruh daerah secara nasional mencapai Rp 62,7 miliar dan di tahun 2012 meningkat menjadi Rp112,7 miliar rupiah. Peningkatan tersebut secara rata-rata dari tahun 2009 hingga 2012 adalah sebesar 21,7%, peningkatan dari tahun 2011 hingga ke 2012 adalah sebesar 24,7%.

Fenomena belanja pada APBD Kabupaten Kota setiap tahun perkembangannya berfluktuasi dari tahun 2008 hingga tahun 2012 dimana perkembangan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 16,83 % , perkembangan terendah pada tahun 2010 yaitu 4,01 % penurunan pada tahun 2008 s.d. 2012, untuk kemudian meningkat. Analisis kemandirian kinerja pemerintah daerah pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kemandirian kinerja keuangan yang bersumber dari APBD antara lain : rasio kemandirian untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah; rasio efisiensi untuk mengukur efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; rasio keserasian untuk mengetahui bagaimana pengalokasian pengalokasian dana belanja daerah pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik; rasio pertumbuhan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebelumnya; dan rasio proporsi untuk melihat proporsi dari pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap totalnya (Abdul Halim, 2007).

Berdasarkan informasi tersebut maka penulis ingin memahami lebih dalam tentang analisis kinerja APBD Kabupaten dan Kota seProvinsi Jambi dengan pokok permasalahan adalah : Bagaimana deskripsi pengelolaan APBD pada pemerintahan kabupaten dan kota Provinsi Jambi tahun 2008 hingga tahun 2012 dan bagaimanakah pengaruh efektivitas, efisiensi dan keserasian terhadap kemandirian keuangan Daerah baik secara parsial maupun simultan (Studi kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jambi).

2. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2002: 128). Kemandirian Keuangan Daerah ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Hersey dan Blanchard dalam Halim(2001:168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu:

- (1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial);
- (2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;
- (3) Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat;
- (4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

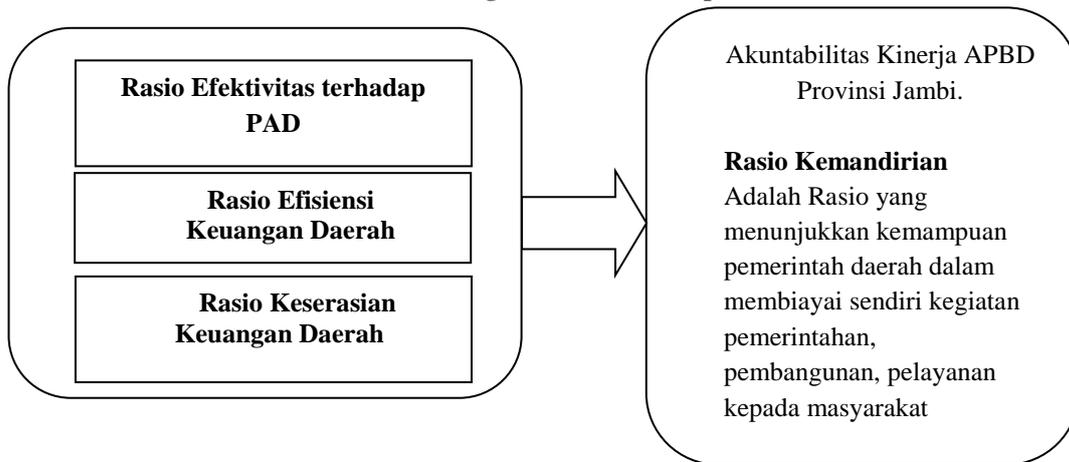
Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Abdul Halim, 2007). Menurut Arifin Sabeni dan Imam Ghozali (2001), anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Anggaran pemerintah merupakan pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan dan di dalam anggaran disajikan rencana-rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasinya secara sistematis.

Akuntabilitas keuangan daerah mempunyai ciri pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan pengelolaan pemerintahan yang baik (Abdul Halim, 2007). Dilihat dari sudut pandang Pengendalian pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan, maka akuntabilitas mengandung pengertian kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Tujuan dan sasaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja keuangannya. yang dilihat dari proporsi APBD setiap tahunnya.

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir Konseptual



Berdasarkan teori dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya dapat diperoleh perumusan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Bahwa secara partial terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas, efisiensi dan keserasian terhadap kemandirian keuangan Daerah (Studi kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jambi)
- H₂ : Bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas, efisiensi dan keserasian terhadap kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jambi)

3. METODOLOGI

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data berupa rasio-rasio keuangan dalam menilai akuntabilitas kinerja APBD Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi terhadap laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi tahun 2008 hingga 2012 yang telah di audit BPK dan diopertanggung jawabkan pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi kemudian dipublikasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi.

Penelitian ini merupakan *Explanatory Research* yaitu menjelaskan bahwasasio keuangan dalam analisis APBD yang berupa efektivitas, efisiensi, keserasian, pertumbuhan, dan proporsi pendapatan dan belanja pada APBD Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi mempunyai pengaruh terhadap *kemandirian* . APBD Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi dalam menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Halim, 2007:128) sebagai berikut:

Rasio

$$\text{kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

2. Rasio Efektifitas

Analisis efektifitas menggambarkan kemampuan penda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Rumusan rasio efektifitas yaitu:

Rasio Efektivitas

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi Riil daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Abdul Halim, 2007:234)

Rasio

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi

dananya pada belanja aparatur daerah dan belanjaTotal Realisasi Belanja DaerahTotal Realisasi Pendapatan Daerah pelayanan publik secara optimal (Abdul Halim, 2007:235).

$$\text{Rasio Belanja Aparatur Daerah Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Aparatur Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Pelayanan Publik Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskripsi kuantitatif dan Analisis Regresi Berganda serta pengujian hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi rasio kemandirian dari 9 (Sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota di ProvinsiJambi, rata-rata capaian sebesar 5,10 % artinya dana pembantuan dari pusat mendominasi pada semua jabupaten Kota di Provinsi Jambi dengan besaran diatas 90 % dari dana APBD Kabupaten Kota. Hal ini menunjukkan bahwa dana Pendapatan Asli Daerah hanya mampu membiayai APBD dibawah 10 % , kondisi ini menunjukkan ketidak mandirian Kabupaten Kota di Provinsi Jambi dalam melaksanakan otonomi Daerah karena sebagian besar kebutuhan APBD dibiayai oleh dana bantuan Pusat.

Tabel 1 : Rekapitulasi Rasio Kemandirian Kabupaten Kota Se-Propinsi Jambi Tahun 2008 – 2012

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Kerinci	4.42%	4.71%	4.50%	5.24%	5.66%	4.91%
2	Merangin	4.38%	5.17%	6.24%	3.58%	4.68%	4.81%
3	Sarolangun	3.22%	4.83%	5.51%	3.58%	3.66%	4.16%
4	Bungo	9.30%	9.00%	7.60%	8.21%	11.58%	9.14%
5	Tebo	2.98%	3.93%	6.45%	3.64%	3.53%	4.11%
6	Batanghari	5.12%	5.77%	5.84%	5.15%	4.73%	5.32%
7	Muaro Jambi	3.20%	3.46%	2.98%	3.06%	3.23%	3.19%
8	Tanjung Jabung Barat	3.83%	2.88%	3.38%	3.54%	3.80%	3.49%
9	Tanjung Jabung Timur	2.80%	3.30%	3.38%	3.60%	4.00%	3.42%
10	Kota Jambi	7.98%	8.86%	12.58%	11.39%	11.51%	10.46%
11	Kota Sungai Penuh	2.83%	2.83%	3.18%	4.41%	4.60%	3.57%
	Rata-rata	4.55%	4.98%	5.60%	5.04%	5.54%	5.14%

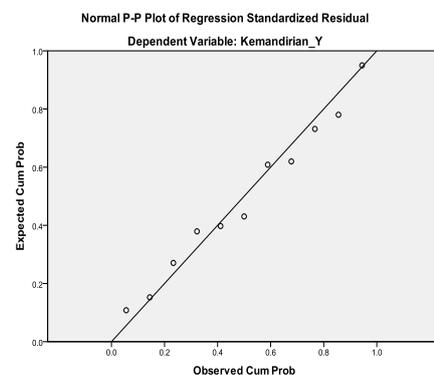
Sumber : Data Sekunder yang Diolah Tahun 2013

Sumber : Dwirandra, (2007: 7)

1. Uji Asumsi Klasik

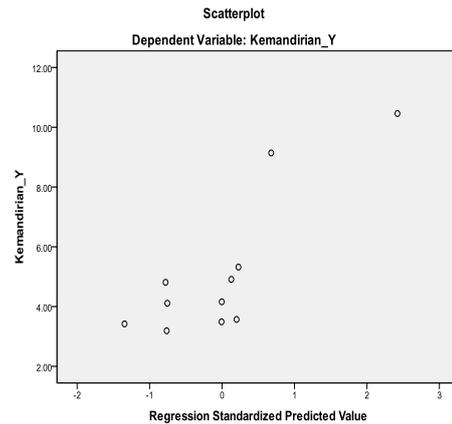
a. Uji Normalitas

Berdasarkan keterangan grafik di atas, titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



b. Uji Multikolinieritas

Seluruh variable independen yaitu efektivitas, efisiensi dan Keserasian memiliki angka *Variance Inflation Factors* (VIF) di bawah 10 yaitu 1,809, 2,204 dan 1,484 dan angka *tolerance* yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10 yaitu 0,553, 0,454 dan 0,674. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.



c. Uji Autokorelasi

Nilai DW 2.270 lebih besar dari batas atas (du) 1,71 dan kurang dari 2,28 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak bisa menolak H0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif atau negatif (sesuai tabel keputusan) atau dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik *Scatterplot* terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

2. Uji Statistik

Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda.

Tabel 2. Uji Regresi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.792	8.630		1.135	.294		
Efektivitas_X1	-.258	.087	-.835	-2.967	.021	.553	1.809
Efisiensi_X2	.262	.114	.716	2.306	.054	.454	2.204
Keserasian_X3	-.161	.070	-.591	-2.321	.053	.674	1.484

a. Dependent Variable = Kemandirian_Y

Dari table diketahui bahwa bentuk persamaan regresinya adalah:

$$Y = 9,792 - 0,258 X_1 + 0,262 X_2 - 0,161 X_3$$

- a. Dalam persamaan regresi diatas, konstanta (β_0) adalah sebesar 9,792 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel Efektivitas pencapaian PAD (X1), Efisiensi Belanja (X2), dan Keserasian antara belanja aparat dan public (X3), yang mempengaruhi, maka Kemandirian APBD Kabupaten Kota dapat meningkatkan otonomi daerah sebesar 9,792.
- b. Nilai koefisien efektivitas pencapaian target PAD dalam (X1) sebesar 0,258 berpengaruh negatif terhadap kemandirian pemerintah (Y). Hal ini

mengandung arti bahwa setiap kenaikan efektivitas satu persen maka variabel kemandirian pemerintah kabupaten dan kota turun sebesar 0,258 persen dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.

- c. Nilai koefisien efisiensi (X2) sebesar 0,262 berpengaruh positif terhadap kemandirian APBD Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kegiatan efisiensi belanja maka variabel kemandirian APBD Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi sebesar 0,262 persen dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- d. Nilai koefisien keserasian anggaran (X3) sebesar 0,161 berpengaruh negatif terhadap kemandirian pemerintah daerah Kabupaten dan Kota (Y). Hal

ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan keserasian dari satu persen maka variabel kemandirian pemerintah Kabupaten Kota akan menurun sebesar 0,161 persen dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh variabel efektivitas, efisiensi dan keserasian secara bersama-sama meningkat kemandirian yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya adalah :

Tabel 3. Nilai Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.833	.694	.563	1.59910	.694	5.288	3	7	.032	2.270

a. Predictors: (Constant), Keserasian X3, Efisiensi X2, Efektivitas X1

b. Dependent Variable: Kemandirian Y

Pada tabel menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai R-Square (R^2) sebesar 0,694 hal ini berarti 69,4 % variasi kemandirian dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu Efektivitas, efisiensi dan keserasian. Sedangkan sisanya ($100\% - 69,4\% = 30,6\%$) dijelaskan sebab yang lain diluar model.

3. Uji Hipotesis

Hasil uji t membuktikan variable efektivitas menunjukkan angka signifikansi $0,021 < \alpha = 0,05$ dan $\alpha = 0,1$ dengan nilai t hitung $2,967 > t$ table 1,833 ($df=11-2=9$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya efektivitas penerimaan daerah terhadap target berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian APBD Kabupaten dan Kota di provinsi Jambi. Berarti dapat digambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (efektifitas) tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten dan kota se provinsi Jambi terhadap bantuan dana ekstern yaitu bantuan pemerintah pusat dari dana perimbangan dan pendapatanlain yang sah sangat tinggi.

Pelaksanaan efisiensi terhadap kemandirian APBD Kabupaten Dan Kota se Provinsi Jambi menunjukan tingkat signifikansi yang diperoleh nilai signifikansi $0,054 < \alpha = 0,1$ dengan t hitung $2,306 > t$ table 1,833 ($df=11-2=9$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota se provinsi Jambi tingkat efisiensi berada pada daerah yang telah ditetapkan, dengan kata lain, pemerintah kabupaten dan Kota se provinsi Jambi cenderung menggunakan seluruh anggaran belanja yang ada. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota se provinsi Jambi sudah mengarah pada azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah.

Keserasian dalam belanja yaitu antara belanja public dan belanja aparatur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian pemerintah APBD Kabupaten Dan Kota se Provinsi Jambi dan tingkat signifikansi $0.053 < \alpha = 0,1$ t hitung $2,321 > t$ table 1,833 ($df=11-2=9$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemandirian tidak memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap rasio keserasian belanja public. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten dan kota dengan kemandirian yang kecil akan cenderung terkadang tidak memiliki belanja pembangunan yang besar. Hal ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin / belanja operasional.

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas, efisiensi keserasian terhadap kemandirian APBD Kabupaten Kota se Provinsi secara bersama – sama. Berdasarkan table 3 di atas, menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0.032. berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_a diterima. Sehingga variabel efektivitas, efisiensi dan keserasian secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kota Provinsi Jambi. Sehingga jika efektivitas, efisiensi dan keserasian secara bersama-sama meningkat, maka kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kota se Provinsi Jambi. juga akan meningkat.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh efektivitas, efisiensi dan keserasian terhadap kemandirian APBD Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi. Hasilnya menyatakan bahwa :

1. Ditinjau dari Rasio kemandirian yang hanya 5,14% menunjukan bahwa kondisi keuangan

- Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi, belum mampu untuk mandiri, tingkat Efektivitas 95,96% dengan jumlah realisasi PAD lebih kecil daripada target/alokasi yang dibuat jadi keuangan daerah dikatakan tidak efektif dan realisasi belanja pembangunan tidak optimal khususnya untuk kepentingan public, tingkat Efisiensi 108,03% berarti penggunaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan jumlah realisasi pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan, serta nilai rasio keserasian 50,52% yang mencerminkan Kondisi belanja pada APBD Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi, masih condong pada belanja aparatur dari pada belanja pelayanan public/pembangunan.
2. Pengaruh Efektivitas, efisiensi dan keserasian secara parsial terhadap kemandirian APBD Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi yaitu Rasio efektivitas daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio kemandirian, Rasio Efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian untuk pelayanan public, Rasio Keserasian belanja publik terhadap kemandirian PAD Kabupaten Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pelayanan public, yang kecil.
 3. Pengaruh Efektivitas, efisiensi dan keserasian secara Simultan terhadap kemandirian APBD Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi yaitu signifikansi F sebesar 0.032. berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas, efisiensi dan keserasian secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kota Provinsi Jambi. Sehingga jika efektivitas, efisiensi dan keserasian secara bersama-sama meningkat, maka kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kota se Provinsi Jambi. juga akan meningkat.

Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap ratio efektivitas, efisiensi dan keserasian terhadap kemandirian APBD Kabupaten Kota se Provinsi Jambi tahun 2008-2012 sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Jambi harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat / Propinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).
- b. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Jambi mampu merealisasikan efektivitas Penerimaan PAD melebihi target yang ditetapkan dimana pemerintah harus selektif dalam mengoptimalkan retribusi dan pajak .

- c. Pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Jambi perlu melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan melakukan pembangunan yang didasarkan atas skala prioritas dan efisiensi.

DAFTAR REFERENSI

- Amirudin. (2009). Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta TA 2008). Tesis S2. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Abdullah, S. (2008). Pengalokasian Belanja fisik dalam Anggaran Pemerintahan Daerah : Studi Emperis atas Determinan dan Konsekwensinya terhadap Belanja Pemeliharaan. Laporan Penelitian. Bengkulu.
- Bastian, Indra. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik . Salemba Empat. Jakarta.
- Devas, et al. (2007) .Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Terjemahan Marsi Maris. UI-Press. Jakarta.
- Eka Saputra, Andra. (2007). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara. Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU. Medan.
- Fatchurrochman, Agam, (2002), Manajemen Keuangan Publik, Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Corruption Watch, 23-25 Januari 2002, Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2005). Analisis multivariate dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2001). Anggaran daerah dan “fiscal stress” (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 16 (4): 346-357.
- Handayani, Hj. Rr. Sri. 2010. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah) Artikel.
- Kusumayoni. (2004). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Pengeluaran Daerah di Kab. Klungkung. Tesis S2 PPS UNPAD. Bandung (tidak dipublikasikan).

- Mardiasmo, (2001), Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Andi, Jogjakarta.
- _____, (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah, Andi, Jogjakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- Redjo, Samagio Ibnu. (1998). Keuangan Pusat dan Daerah. BKU Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi Pascasarjana Kerjasama Universitas Padjajaran. Bandung. Republik Indonesia,
- Republik Indonesia, (2001), Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung.
- _____, (2001), Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran, Citra Umbara, Bandung.
- _____, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- _____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- _____, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sugiono. (2001). Statistik Non Parametrik untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.
- Suparmoko. (2002). Ekonomika Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta.
- Syamsi, Ibnu. (1994). Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara. Rineka Cipta. Jakarta.
- Yani, Ahmad. (2008). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Yuwono, Sony. Dkk. (2005). Penganggaran Sektor Publik. Bayumedia Publising. Surabaya.

www.jambiprov.go.id